

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Evaluasi kebijakan merupakan bagian integral dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan berperan dalam memberikan informasi berbasis bukti kepada para pembuat kebijakan guna meningkatkan kualitas kebijakan yang sedang berjalan maupun yang akan dirancang. Sementara itu, Bridgman dan Davis (2004) menekankan bahwa evaluasi kebijakan membantu dalam mengidentifikasi apakah kebijakan yang telah diterapkan telah mencapai tujuan yang diharapkan serta bagaimana cara memperbaikinya jika terdapat kelemahan dalam implementasinya.

Dalam konteks pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan, evaluasi kebijakan menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Program-program yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti perencanaan yang tidak optimal, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta keterbatasan anggaran. Keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Pressman dan Wildavsky (1984), sangat bergantung pada koordinasi antar aktor yang terlibat serta efektivitas birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kapasitas administrasi dan dukungan politik yang mengiringinya.

Lipsky (1980) menambahkan bahwa kapasitas pelaksana di tingkat birokrasi bawah, seperti street-level bureaucrats, memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan benar-benar diimplementasikan sesuai dengan tujuan awalnya.

Konsep birokrasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga menjadi aspek penting dalam evaluasi kebijakan. Weber (1947) menggambarkan birokrasi sebagai struktur organisasi yang rasional dan hierarkis yang bertugas untuk menjalankan perintah pemerintah secara efisien. Namun, dalam praktiknya, birokrasi sering kali menghadapi kendala berupa resistensi internal, keterbatasan sumber daya, serta intervensi politik yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Allison (1971) menyoroti bahwa birokrasi tidak selalu netral dalam implementasi kebijakan, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik yang ada di dalamnya. Birokrasi bahkan dikatakan sebagai *“the single authoritarian institution,”* karena menjadi organ utama dalam pemerintahan yang dapat bertindak atas nama negara (Setiyono, 2012). Oleh karena itu, hubungan antara birokrasi dan politik menjadi faktor penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan publik.

Pada tahun 2019, salah satu program unggulan yang digagas oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat itu adalah Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera.” Gerakan ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan konsep kolaborasi berjenjang dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi). Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera” dilaksanakan oleh sejumlah 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran pelaksanaan diarahkan pada 745 desa dengan kategori tingkat

kesejahteraan rendah (desa merah) di 14 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Adapun 14 Kabupaten tersebut di antaranya yaitu sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1. sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Pemetaan Desa Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di 14 Kabupaten Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Prioritas			Total
		Prioritas 1 (Desa Merah)	Prioritas 2 (Desa Kuning)	Prioritas 3 (Desa Hijau)	
1.	Banyumas	70	101	160	331
2.	Purbalingga	49	68	122	239
3.	Banjarnegara	58	83	137	278
4.	Kebumen	75	167	218	460
5.	Purworejo	54	124	316	494
6.	Wonosobo	53	73	139	265
7.	Klaten	88	136	177	401
8.	Sragen	42	57	109	208
9.	Grobogan	65	87	128	280
10.	Blora	44	83	168	295
11.	Rembang	38	86	170	294
12.	Demak	40	90	119	249
13.	Pemalang	35	72	115	222
14.	Brebes	34	90	173	297
GRAND TOTAL		745	1.317	2.251	4.313

Sumber: Buku Panduan Pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019.

Kemiskinan ekstrem atau juga dikenal dengan kemiskinan absolut didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Definisi penduduk miskin ekstrem berdasarkan Bank Dunia tahun 2022, yaitu penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. Tjondronegoro (1984)

mengungkapkan bahwa seseorang yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sandang atau pakaian dan pangan atau makanan.

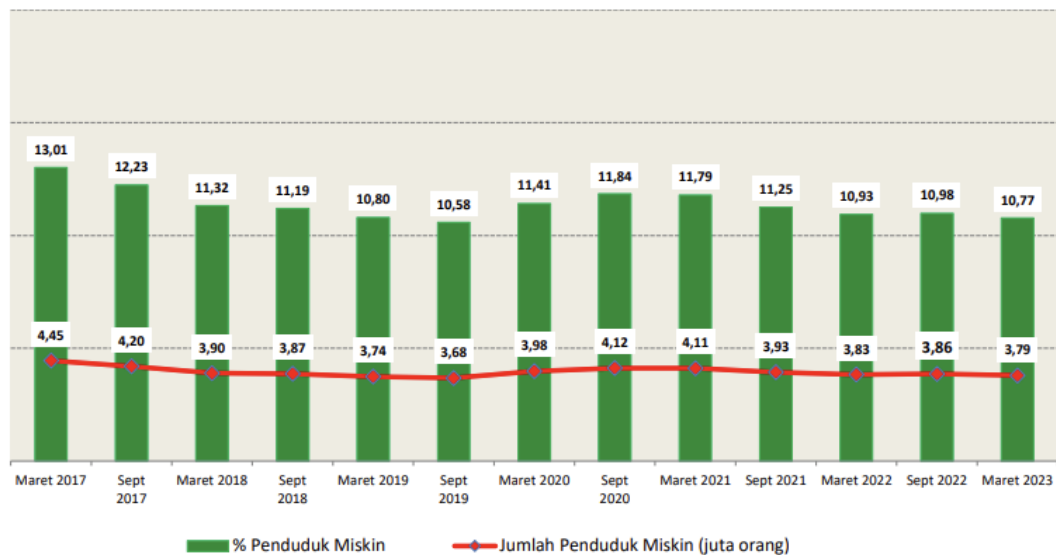
Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ketiga di Indonesia pada Maret 2023 berdasarkan data dari BPS sebagaimana tercantum dalam tabel 1.2. Terdapat setidaknya 3,79 juta jiwa penduduk miskin atau sebesar 10,77 persen. Jika dibandingkan dengan data pada September 2022, terdapat penurunan sebesar 0,21 persen atau mengalami penurunan berkisar 66,73 ribu orang. Kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan pada tahun 2023. Jika pada tahun 2022 kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,97 persen, pada tahun 2023 telah diturunkan sebesar 0,87 persen hingga menjadi 1,1 persen. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 10,02 persen, turun menjadi 9,78 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 12,05 persen, turun menjadi 11,87 persen pada Maret 2023. Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal senilai Rp5,79 miliar atas upaya penurunan kemiskinan tersebut.¹

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Hal ini tertuang dalam misi ketiga pembangunan daerah yaitu: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. dengan tujuan antara lain: 1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun

¹ Lihat: jatengprov.go.id, (2023). <https://jatengprov.go.id/publik/kemiskinan-ekstrem-jateng-2023-tinggal-11-pj-gubernur-genjot-tuntaskan-hingga-0-pada-2024/>

secara merata; dan 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah; 2) menurunnya pengangguran terbuka; dan 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

Gambar 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah, Maret 2013-Maret 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, (2023).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2013-2018 diwujudkan dalam bentuk: (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan.

Strategi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena melibatkan seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program yang diwujudkan dalam bentuk pendampingan desa kategori miskin ekstrem ini menjadi penting untuk diperhatikan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendekatan yang diambil, yaitu dengan tidak menyasar langsung kepada masyarakat miskin, melainkan ditujukan ke desa yang masuk kategori miskin ekstrem.

Selain itu, Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan juga mengharuskan OPD untuk menyelenggarakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya dengan terlibat langsung dalam pendampingan desa dan masyarakat miskin. Seluruh OPD diwajibkan untuk mendampingi desa, meskipun tidak semua OPD memiliki tupoksi yang relevan dengan pengentasan kemiskinan. Beberapa OPD yang memiliki peran administratif, seperti Biro Hukum, Biro Pemotdaker, atau Bappeda, juga diberikan tanggung jawab untuk mendampingi desa miskin ekstrem. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara peran utama OPD dengan tugas yang diberikan dalam program, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menyesuaikan peran mereka dengan kebutuhan spesifik desa dampingan.² Selain itu, sebagian besar OPD tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk mendukung

² Lihat: beritajateng.tv, (2025). <https://beritajateng.tv/program-satu-opd-satu-desa-guna-entaskan-kemiskinan-di-era-ganjar-dianggap-tak-efektif-akankah-hilang-tahun-2025/2/>

program ini, yang menyebabkan keterbatasan dalam memberikan intervensi nyata bagi desa dampingan dan membuat keterlibatan OPD cenderung bersifat administratif dibandingkan substantif.

Dari perspektif evaluasi kebijakan, keterlibatan seluruh OPD dalam program ini berpotensi tidak hanya mencerminkan pendekatan teknokratis, tetapi juga memiliki dimensi politik. Program ini tertuang dalam RPJMD sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah, yang mengharuskan seluruh OPD untuk berkontribusi dalam agenda penanggulangan kemiskinan. Namun, tidak semua OPD memiliki kapasitas teknis yang memadai, sehingga implementasi program ini sering kali lebih menekankan pada kepatuhan administratif dibandingkan dengan dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dalam RPJMD yang mengikat seluruh OPD untuk terlibat dalam program ini, meskipun tidak semua OPD memiliki kapasitas teknis yang memadai.

Urgensi evaluasi kebijakan semakin diperjelas dalam perspektif teori kebijakan publik. Anderson (2011) menyatakan bahwa kebijakan publik bersifat dinamis dan harus terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjawab permasalahan sosial. Patton dan Sawicki (1993) juga menekankan bahwa evaluasi kebijakan bukan hanya alat untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki formulasi dan implementasi kebijakan di masa depan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat berfungsi sebagai instrumen korektif yang memastikan bahwa program yang diterapkan benar-benar memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat sasaran.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana evaluasi kebijakan program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan di Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis evaluasi kebijakan program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teori terkait evaluasi kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan manfaat bagi pembuat dan pelaksana kebijakan untuk mengetahui evaluasi serta hambatan dalam implementasi kebijakan.
3. Dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di kemudian hari.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca untuk lebih memahami mengenai evaluasi kebijakan program pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Memberikan manfaat bagi pembuat dan pelaksana kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas dan sinergisitas dalam proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai evaluasi kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian para akademisi di berbagai belahan dunia. Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi efektivitas implementasi kebijakan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan, sementara penelitian lain berfokus pada peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Besharov dan Call (2016) dalam studi mereka mengenai evaluasi kebijakan bantuan sosial di Amerika Serikat menemukan bahwa program berbasis bantuan langsung sering kali menghadapi kendala dalam implementasi akibat lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan aktor kebijakan di tingkat lokal. Studi ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan kebijakan, sebuah aspek yang juga relevan dalam penelitian ini, mengingat keterlibatan banyak OPD dalam Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan. Namun, perbedaan utama dari penelitian ini adalah fokusnya pada konteks kebijakan sosial di Amerika Serikat, sementara penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan di tingkat daerah di Indonesia.

Di Indonesia, penelitian oleh Nugroho (2020) menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan sering kali mengalami inefisiensi akibat tumpang

tindihnya kewenangan antarinstansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mengonfirmasi pentingnya koordinasi yang efektif dalam implementasi kebijakan, yang juga menjadi isu utama dalam penelitian ini. Sementara itu, Prasetyo dan Kuncoro (2019) menemukan bahwa keterlibatan komunitas lokal dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial. Hal ini relevan dengan penelitian ini karena menyoroti pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, meskipun penelitian ini lebih menekankan evaluasi terhadap birokrasi dan implementasi kebijakan daerah.

Selain itu, Arifin (2020) meneliti peran budaya kemiskinan dalam efektivitas program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor budaya juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan, yang memberikan perspektif tambahan dalam memahami efektivitas kebijakan publik. Namun, penelitian ini tidak berfokus pada aspek birokrasi dan koordinasi kebijakan seperti dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Arief, Jumadi, dan Abdullah (2016) menyoroti bagaimana pendekatan partisipatif dalam kebijakan sosial dapat meningkatkan efektivitas implementasi program penanganan anak jalanan. Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam kebijakan sosial, yang juga menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan program pengentasan kemiskinan di desa. Namun, fokus penelitian ini pada anak jalanan berbeda dengan fokus penelitian ini yang mengkaji program pendampingan desa.

Beberapa penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Suradi dan Mujiyadi (2009) serta Prasetyo (2021) menyoroti bahwa adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan pengentasan

kemiskinan. Hal ini sesuai dengan temuan awal dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa efektivitas Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan sangat bergantung pada kapasitas OPD dalam memahami kebutuhan spesifik desa dampingan. Novianto (2015) juga mengonfirmasi bahwa koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam efektivitas kebijakan daerah, yang memperkuat pentingnya evaluasi kebijakan dalam penelitian ini.

Dari perspektif yang lebih luas, penelitian Saribulan, Rahman, dan Rasanjani (2023) memberikan gambaran tentang tren penelitian kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa terdapat kebutuhan untuk evaluasi kebijakan yang lebih mendalam guna memahami efektivitas program secara lebih holistik. Sementara itu, penelitian oleh Haryati, Nasikun, dan Tjokrowinoto (2023) menunjukkan bahwa stabilitas politik berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yang juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam evaluasi kebijakan daerah.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa temuan utama yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, banyak kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia menghadapi tantangan dalam aspek implementasi, terutama dalam koordinasi antarinstansi dan alokasi sumber daya. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Ketiga, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan di Jawa Tengah, dengan menyoroti peran OPD dalam implementasi kebijakan dan

keterbatasan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara efektif.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Anderson (2011) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang diambil guna menyelesaikan masalah publik. Jenkins (1978) menekankan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang saling berkaitan dan dilakukan oleh aktor politik serta administratif untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Sementara itu, Thomas Dye (2017) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah "*whatever governments choose to do or not do*" yang berarti bahwa setiap tindakan atau bahkan ketidaktindakan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik yang memiliki konsekuensi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Carl Friedrich (1963) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan respons terhadap permasalahan serta hambatan yang ada, yang dirancang untuk mencapai hasil yang diharapkan. Friedrich menekankan bahwa kebijakan dapat diusulkan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Menurut Dunn (2018), kebijakan publik tidak hanya merupakan keputusan pemerintah tetapi juga suatu proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan berbagai kepentingan dan tujuan yang berbeda. Oleh karena

itu, kebijakan publik sering kali merupakan hasil kompromi antara berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

George R. Terry (1977) menegaskan bahwa kebijakan bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta memberikan pedoman tindakan yang jelas dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dalam konteks ini, kebijakan publik berperan sebagai panduan yang memberikan arah bagi pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki negara. Howlett, Ramesh, dan Perl (2009) menambahkan bahwa kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari faktor ekonomi, sosial, dan politik yang membentuk serta mempengaruhi kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan publik juga mencerminkan ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah serta masyarakat. Dye (2017) menegaskan bahwa kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik, di mana pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi makro, stabilitas politik, serta kepentingan sosial dalam menyusun dan menerapkan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya mencerminkan keputusan teknokratis, tetapi juga merupakan produk dari dinamika politik dan sosial yang berkembang dalam suatu negara. Dalam konteks ini birokrasi bukan lagi menjadi bagian dari penggerak rezim pemerintahan melainkan juga ikut bermain dalam politik dan pengambilan keputusan (Suhardiman dan Giordano 2014; Berenschot, 2018; Alfirdaus dan Manalu, 2020). Ini berarti bahwa kebijakan publik tidaklah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional atau kepentingan umum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik internal di dalam birokrasi (Daniarsyah, 2016 dan Dwijayanti, 2021).

Dalam realitasnya, kebijakan publik dapat mengalami perubahan atau penyesuaian sesuai dengan kondisi yang berkembang. Dunn (2018) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan, karena memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam kebijakan yang telah diterapkan. Dengan demikian, kebijakan publik bersifat dinamis dan memerlukan adaptasi terus-menerus untuk menjawab tantangan yang ada dalam masyarakat.

Dalam proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan utama yang harus diperhatikan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Dunn, 2018; Howlett, Ramesh, & Perl, 2009). Penyusunan agenda adalah tahap awal dalam proses kebijakan publik yang berfokus pada identifikasi masalah yang harus ditangani oleh pemerintah. Pada tahap ini, berbagai aktor seperti masyarakat sipil, kelompok kepentingan, media, serta lembaga pemerintah dapat berkontribusi dalam menentukan isu-isu yang layak untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Tekanan publik sering kali menjadi faktor yang mendorong suatu isu masuk dalam agenda kebijakan, terutama ketika terdapat tuntutan besar dari masyarakat atau ketika permasalahan tertentu mendapatkan perhatian luas melalui media massa. Selain itu, faktor ekonomi, sosial, dan kepentingan politik juga turut mempengaruhi proses ini (Kingdon, 2014).

Setelah suatu isu masuk dalam agenda kebijakan, tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan, di mana berbagai alternatif kebijakan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dampak sosial, serta kemungkinan

implementasi. Berbagai metode analisis kebijakan dapat digunakan, seperti analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) dan analisis SWOT (Dye, 2017). Selain itu, pilihan instrumen kebijakan juga ditentukan dalam tahap ini, yang dapat berupa regulasi, subsidi, pajak, atau program-program khusus yang dijalankan oleh pemerintah.

Adopsi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan disahkan oleh otoritas yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif, atau badan regulasi. Faktor politik sering kali menjadi penentu utama dalam tahap ini, karena keputusan untuk mengadopsi suatu kebijakan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi juga pada kepentingan politik yang ada di dalam pemerintahan. Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, juga dapat mempengaruhi keberhasilan adopsi suatu kebijakan (Howlett et al., 2009).

Setelah kebijakan diadopsi, langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu tahap di mana kebijakan yang telah ditetapkan diterapkan dalam bentuk program atau tindakan nyata di lapangan. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor, termasuk birokrasi pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi non-pemerintah yang berperan dalam menyalurkan dan menjalankan kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti kejelasan peraturan dan pedoman teknis, ketersediaan sumber daya, serta kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan (Mazmanian & Sabatier, 1983).

Tahap terakhir dalam proses kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan, yang bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan atau reformulasi kebijakan di masa mendatang. Jika suatu kebijakan terbukti tidak efektif atau menimbulkan dampak negatif, maka pemerintah dapat melakukan revisi atau bahkan mencabut kebijakan tersebut (Dunn, 2018).

1.6.2. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan umpan balik terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan (Dunn, 2018). Evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti evaluasi formatif yang dilakukan selama kebijakan berlangsung dan evaluasi sumatif yang dilakukan setelah kebijakan diterapkan sepenuhnya.

Menurut Anderson (2011), terdapat enam permasalahan utama yang mungkin muncul dalam proses evaluasi kebijakan, yaitu tujuan kebijakan yang tidak pasti, kausalitas dampak kebijakan, dampak kebijakan yang tidak tepat sasaran, kekurangan dana dan informasi, resistensi pejabat, serta evaluasi yang kurang berdampak. Tujuan kebijakan yang tidak pasti menyebabkan kesulitan dalam menentukan indikator keberhasilan karena tujuan kebijakan tidak jelas atau berubah-ubah. Kausalitas dampak kebijakan mengacu pada kesulitan dalam memastikan bahwa dampak yang terjadi benar-benar disebabkan oleh kebijakan yang dievaluasi, bukan oleh faktor lain.

Dampak kebijakan yang tidak tepat sasaran menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memberikan manfaat kepada kelompok sasaran yang seharusnya menerima dampaknya. Kekurangan dana dan informasi menjadi hambatan dalam memperoleh sumber daya finansial dan data yang akurat untuk mendukung proses evaluasi secara menyeluruh. Resistensi pejabat muncul karena kekhawatiran bahwa hasil evaluasi dapat mengancam posisi atau jabatan mereka, sehingga menimbulkan penolakan terhadap proses evaluasi. Evaluasi yang kurang berdampak terjadi ketika evaluasi yang dilakukan tidak memberikan perubahan nyata karena dianggap tidak relevan atau kurang mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan. Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses evaluasi menjadi tidak maksimal, sehingga sulit untuk menentukan apakah kebijakan perlu direvisi atau diberikan rekomendasi untuk perbaikan di periode berikutnya.

Evaluasi kebijakan juga mempertimbangkan berbagai kriteria dalam menilai keberhasilan kebijakan, seperti efektivitas dalam mencapai tujuan, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, kecukupan dalam mengatasi masalah, pemerataan manfaat bagi masyarakat, responsivitas terhadap kebutuhan publik, serta ketepatan strategi kebijakan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang ada (Dunn, 2003). Bridgman dan Davis (2004) juga menekankan pentingnya dimensi akuntabilitas dalam evaluasi kebijakan. Hasil evaluasi harus digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan baru atau perbaikan kebijakan yang telah ada. Mereka mengembangkan model evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara indikator *input*, proses, *output*, dan *outcome* untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas kebijakan publik.

Selain itu, Bridgman dan Davis (2000) juga mengusulkan bahwa evaluasi kebijakan harus bersifat berkelanjutan agar dapat mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam implementasi kebijakan. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan adanya perbaikan secara bertahap berdasarkan hasil yang diperoleh dari setiap siklus evaluasi, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang. Dengan menggunakan pendekatan evaluasi yang komprehensif, diharapkan program kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang ada, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Menurut Weiss (1998), evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi untuk menilai efektivitas kebijakan, tetapi juga sebagai alat pembelajaran bagi para pembuat kebijakan agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Sementara itu, Patton (2008) menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan dengan pendekatan berbasis pemanfaatan (*utilization-focused evaluation*), di mana hasil evaluasi harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang sedang atau akan diterapkan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bukan hanya menjadi sekadar proses administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam perumusan dan pengembangan kebijakan publik.

Bridgman dan Davis (2000) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan mencakup empat indikator utama, yaitu *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

a. Indikator *Input*

Indikator ini menilai ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Aspek yang dinilai mencakup sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur pendukung lainnya.

b. Indikator *Proses*

Indikator ini mengukur bagaimana kebijakan diterapkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Penilaian mencakup efektivitas dan efisiensi metode atau mekanisme yang digunakan dalam implementasi kebijakan.

c. Indikator *Output*

Indikator ini menilai hasil atau produk yang dihasilkan dari kebijakan. Aspek yang diperhatikan meliputi jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan atau program yang telah diterapkan.

d. Indikator *Outcome*

Indikator ini mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat luas. Dampak yang dinilai meliputi perubahan sosial, ekonomi, serta keberlanjutan manfaat kebijakan dalam jangka panjang

1.6.3. Resistensi Birokrasi Terselubung

Hubungan antara pemerintah dan birokrasi melahirkan dinamika mengenai bagaimana organisasi dan pemerintahan berfungsi. Carpenter dan Krausse (2015) misalnya menyoroti adanya perspektif otoritas transaksional yang mengkritik mekanisme formal dalam konteks politik birokrasi. Hal yang ditekankan adalah adanya aspek kepatuhan dan resistensi informal dalam politik birokrasi. Selanjutnya dapat diketahui bahwa dalam hal implelementasi kebijakan, misalnya,

birokrasi memiliki keleluasaan untuk patuh maupun resisten terhadap keputusan politik yang telah dibuat. Resistensi birokrasi bisa muncul karena ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas secara efektif, serta resistensi terhadap perubahan yang tidak diinginkan atau tidak adil oleh pegawai atau unit tersebut. Hal ini dapat mengarah pada kebingungan, frustrasi, dan bahkan konflik di antara mereka. Ketidakjelasan ini juga dapat menciptakan ambiguitas dalam pembagian kerja, mengganggu koordinasi, dan merusak efisiensi organisasi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, ada beberapa bentuk perlawanan yang bersifat terselubung atau tidak langsung, yang sebenarnya menggabungkan elemen perlawanan dan kepatuhan secara bersamaan. Resistensi atau perlawanan secara tradisional sering kali dikaitkan dengan demonstrasi, aksi protes, pembangkangan, maupun digambarkan sebagai tindakan publik baik dengan metode kekerasan atau tanpa kekerasan terhadap lawannya (Chenoweth dan Cunningham, 2013). Lebih dari itu, definisi mengenai resistensi juga dikembangkan ke arah bentuk perlawanan secara tersembunyi atau terselubung (Scott, 2016; Butz dan Ripmeester, 1999; Malmvig, 2016; Abu-Lughod, 1990; Ewick dan Silbey, 2003; Goodman, 1978). Scott (1986) memperkenalkan konsep resistensi sehari-hari, yaitu resistensi yang kurang terlihat dan dilakukan melalui tindakan-tindakan secara diam-diam, seperti kepatuhan palsu, pengabaian tugas, sabotase, simplifikasi proses, dan diskresi dalam pengambilan keputusan.

Ini menunjukkan bahwa hubungan antara kekuasaan dan perlawanan tidaklah sederhana, tetapi hidup berdampingan dalam sebuah proses yang dialektis, di mana keduanya saling memengaruhi dan membentuk dinamika kekuasaan yang

kompleks. Perlawanan yang bersifat terselubung atau tidak langsung mengacu pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa secara langsung menantang atau menentang kekuasaan yang ada. Sebagai gantinya, mereka mungkin menggunakan strategi seperti penghindaran, sabotase diam-diam, atau penggunaan simbol atau pesan tersembunyi untuk mengekspresikan ketidaksetujuan atau mengganggu kekuasaan yang ada. Scott (2016) menyebutkan bahwa resistensi terselubung atau disebut sebagai “resistensi sehari-hari” pada intinya adalah untuk mengelak dari represi kekuasaan dengan menyembunyikan diri agar tidak terlihat sebagai perlawanan atau resistensi.

1.7. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.7.1. Definisi Konseptual

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis dalam menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang muncul dalam implementasinya. Menurut Bridgman dan Davis (2000), evaluasi kebijakan mencakup analisis terhadap *input*, proses, *output*, dan *outcome* guna memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan kebijakan di masa mendatang. Evaluasi kebijakan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, serta memberikan landasan ilmiah dalam pengambilan keputusan kebijakan publik (Badjuri & Yuwono, 2003).

1.7.2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan dapat dikaji melalui empat indikator utama yang mencerminkan tahapan implementasi dan dampaknya, yaitu *input*, proses, *output*, dan *outcome* (Bridgman dan Davis, 2000), sebagai berikut:

a. Indikator *Input*

Indikator ini menilai kesiapan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk:

- 1) Sumber daya manusia: Ketersediaan serta kompetensi tenaga kerja yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan.
- 2) Alokasi anggaran dan sarana pendukung: Ketersediaan dana serta tingkat kesiapan fasilitas, aksesibilitas, dan dukungan infrastruktur dalam implementasi kebijakan.

b. Indikator Proses

Indikator ini mengukur bagaimana kebijakan diimplementasikan dan sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana, mencakup:

- 1) Mekanisme kerja: Proses operasional, yaitu prosedur, metode, dan cara yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan.
- 2) Koordinasi antar pemangku kepentingan: Tingkat kerja sama dan sinergi antarinstansi yang terlibat dalam kebijakan.

c. Indikator *Output*

Indikator ini menilai hasil nyata yang dihasilkan dari kebijakan yang telah diimplementasikan, termasuk:

- 1) Produk kebijakan dan penerima manfaat: Bentuk konkret kebijakan yang dihasilkan serta cakupan kelompok sasaran yang telah menerima manfaat dari kebijakan.
- 2) Kualitas hasil kebijakan: Evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan.

d. Indikator *Outcome*

Indikator ini berfokus pada dampak jangka panjang kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, meliputi:

- 1) Dampak sosial dan ekonomi: Perubahan perilaku, kesejahteraan sosial, serta pengaruh kebijakan terhadap kondisi ekonomi individu dan komunitas.
- 2) Keberlanjutan dampak: Kemampuan kebijakan dalam memberikan manfaat jangka panjang serta dampaknya yang berkelanjutan terhadap masyarakat.

Selanjutnya, tindakan resistensi birokrasi secara terselubung dalam Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan di Jawa Tengah dikaji melalui adanya bentuk resistensi berupa kepatuhan palsu, pengabaian tugas, sabotase, simplifikasi dalam proses implementasi, dan diskresi dalam pengambilan keputusan (Scott, 1986), sebagai berikut:

a. Kepatuhan Palsu

Birokrat mungkin tampak melaksanakan tugas sesuai perintah, namun di belakang layar mereka tidak benar-benar berkomitmen untuk mencapai tujuan kebijakan. Ini bisa termasuk pengisian laporan yang tidak akurat atau pengabaian detail penting dalam pelaksanaan tugas.

b. Pengabaian Tugas

Tindakan ini mencakup penundaan atau tidak melaksanakan tugas yang dianggap tidak sesuai dengan tupoksi atau tidak sesuai kondisi nyata di lapangan. Misalnya, birokrat mungkin tidak memprioritaskan program yang dianggap tidak realistis atau tidak mendukung kebutuhan masyarakat lokal.

c. Sabotase

Ini meliputi tindakan yang tampaknya tidak merugikan tetapi sebenarnya bertujuan untuk menghambat implementasi kebijakan. Contohnya, birokrat dapat memilih untuk tidak mendukung atau memfasilitasi program yang mereka anggap tidak efektif, melalui pengabaian atau kurangnya informasi kepada pihak yang terlibat.

d. Simplifikasi Proses

Penggunaan prosedur yang disederhanakan sebagai bentuk resistensi, di mana birokrat secara tidak langsung mengurangi keefektifan kebijakan dengan mengabaikan langkah-langkah yang dianggap terlalu rumit atau tidak relevan dengan kondisi lapangan. Hal ini menciptakan ketidakpatuhan yang tidak terlihat, di mana tindakan-tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk membuat pekerjaan lebih efisien, padahal bisa mengorbankan tujuan kebijakan.

e. Diskresi dalam Pengambilan Keputusan

Birokrat tingkat bawah menggunakan diskresi mereka untuk menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Ini sering kali melibatkan keputusan yang tidak sesuai dengan kebijakan formal, tetapi lebih relevan dengan konteks lokal.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti konsep dan variabel serta menghubungkannya satu sama lain dalam konteks evaluasi kebijakan program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan di Jawa Tengah.

1.8.2. Ruang Lingkup/Fokus

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian mengenai evaluasi kebijakan program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah. Dalam mengkaji evaluasi kebijakan, penelitian ini mengambil objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari informasi yang diberikan oleh informan atau narasumber. Informasi diperoleh dari kata-kata atau hasil wawancara melalui percakapan yang dilakukan peneliti dengan informan secara interaktif.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data untuk memperkuat fakta dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, data yang didapatkan

dari buku, jurnal, laporan-laporan, serta sumber-sumber lain yang masih berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.4. Pemilihan Informan

Dalam mengkaji evaluasi kebijakan, penelitian ini mengambil data melalui wawancara dengan beberapa informan. Wawancara dilakukan terhadap *key person* (informan kunci) pelaksanaan program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Jawa Tengah. Beberapa Informan tersebut adalah Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, lima OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 5 kepala desa penerima manfaat program.

Tabel 1.2.
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Posisi/Jabatan
1.	Eny Suryani, S.Pd., M.Dev.Plg	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Nurwi Mayasari F	Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah / Sekretariat TKPK
3.	Titut Amalia	Fungsional Perencana Muda Bappeda Provinsi Jawa Tengah
4.	Ameliasari Budiprahara, S.IP., M.Si.	Kepala Sub Bagian Program Bappeda Provinsi Jawa Tengah
5.	Sri Wahyuningsih	Koordinator PPHD (Penegakan Produk Hukum Daerah) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
6.	Ir. Betty Wulandari, MP.	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kerja Sama Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama (Biro Pemotdaker) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

7.	Mashfufah, S.T.	Kepala UPT Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah
8.	Sandy Suharto Putro, S.Par., M.Si.	Analisis Objek Wisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah
9.	Priyadi	Kepala Desa Kedungwaduk, Karangmalang, Sragen
10.	H.M. Sucipto, S.Pd.I.	Sekretaris Desa Krajanbogo, Bonang, Demak
11.	Muhammad Qoif	Kepala Desa Prampelan, Sayung, Demak
12.	Khanafi	Kepala Desa Sidogemah, Sayung, Demak
13.	Suyati	Kepala Desa Tibayan, Jatinom, Klaten

Sumber: diolah peneliti.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan yang berlangsung dengan narasumber/informan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi melalui pernyataan dan jawaban yang disampaikan oleh informan dalam konteks evaluasi kebijakan program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengkaji dan menelusuri dokumen-dokumen yang menunjang pelaksanaan penelitian. Dokumen yang juga dapat dijadikan sebagai data sekunder adalah dokumen yang memuat data-data penunjang terkait evaluasi kebijakan program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Jawa Tengah.

1.8.6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai sebuah tahapan untuk memilih dan menyortir poin-poin utama terkait masalah dan topik utama yang sedang diteliti. Pemilihan dan penyortiran ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat melihat suatu gambaran yang lebih jelas sehingga dapat memudahkan pelaksanaan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dituangkan dalam wujud deskripsi untuk memaparkan data serta dikaitkan dan dilandaskan pada teori yang digunakan untuk menganalisis kasus yang diteliti. Data juga disajikan dalam bentuk gambar, tabel, maupun uraian singkat dan sejenisnya guna mempermudah penulis dalam memahami kasus yang diteliti serta guna memudahkan pembaca dalam memahami penyajian penelitian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian ini penulis dengan berlandaskan pada teori, data, dan fakta di lapangan menutup penelitian dengan penarikan kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, penulis sajikan benang merah dari penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan apa yang telah didapatkan.

1.8.7. Kualitas Data

Keabsahan data kualitatif perlu dibuktikan dengan adanya validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Hal ini merujuk pada kualitas data serta ketepatan metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan atau kasus. Untuk membuktikannya dapat dilakukan dengan triangulasi data, yaitu proses membandingkan keseluruhan data yang diperoleh.